

KOMITMEN PEMKOT CIPTAKAN RUANG TERBUKA

Tiap Tahun RTH Publik Akan Terus Ditambah

YOGYA (KR) - Setiap tahun keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Yogya akan terus diupayakan penambahan. Meski beberapa kali terjadi efisiensi anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat, namun RTH publik dinilai sebuah kebutuhan bagi masyarakat.

Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Rina Aryati Nugraha, menjelaskan setelah ada kebijakan efisiensi anggaran, pada tahun 2025 akan dibangun tiga RTH publik berbasis kampung. Dua RTH publik adalah pembangunan

baru dan satu RTH publik meneruskan pembangunan tahun sebelumnya. Pembangunan baru akan dilakukan di RW 7 Giwangan dan RW 06 Pakuncen. Sedangkan di RW 11 Giwangan melanjutkan pembangunan RTH publik tahun lalu yang belum lengkap sarannya.

"Pembangunan dilakukan triwulan kedua dan ketiga. Tahapannya saat ini sudah masuk di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Konsep RTH publik yang dibangun fungsinya multiguna. Untuk fungsi ekologis harus ada vegetasi hijau dan bisa dimanfaatkan untuk

kegiatan masyarakat," urainya, Kamis (8/5).

Pembangunan RTH publik di RW 7 Giwangan Kampung Ponggalan seluas 318 meter persegi dengan alokasi anggaran sekitar Rp 332 juta.

Sedangkan RTH publik di RW 06 Pakuncen seluas 765 meter persegi dengan anggaran sekitar Rp 504 juta. Untuk RTH publik di RW 11 Giwangan Kampung Mendungan seluas 500 meter persegi dan tahun ini dialokasikan sekitar Rp 651 juta. Pembangunan RTH publik tersebut seluruhnya menggunakan APBD

Kota Yogya tahun 2025.

"Lahannya sudah siap. Lahan statusnya sudah milik Pemkot Yogya. Untuk Giwangan RW 11 melanjutkan pembangunan karena kemarin baru landscape-nya. Tahun ini membangun pendapa, menambah lampu, kursi dan lainnya," terangnya.

Rina menyebut saat ini ada 64 RTH publik permukiman yang dikelola DLH Kota Yogya. Selain itu ada taman pinggir jalan dan perindang yang juga dikelola DLH Kota Yogya dengan luas sekitar 76,7 hektare. Berdasarkan data tahun 2024, total

persentase RTH di Kota Yogya mencapai sekitar 23,351 persen. Jumlah itu terdiri dari 8,063 persen RTH publik dan 15,288 persen RTH privat.

Sebelumnya Wali Kota Yogya Hasto Wardoyo, mengatakan akan terus menambah RTH publik di Kota Yogya.

Penambahan RTH publik itu tidak hanya untuk fungsi ekologi, tapi juga memberikan ruang sosialisasi dan rekreasi bagi masyarakat. Dalam beberapa kegiatan di wilayah Hasto melihat ada sebagian lahan yang dapat dimanfaatkan untuk RTH publik. (Dhi)-f

HUT ke-80, Dibuka 'Sekolah Umrah Bareng KR'



Usai penandatanganan MoU Sekolah Umrah Bareng KR antara Latifa Haramain dan PT BP KR dilakukan foto bersama.

YOGYA (KR) - Memperingati HUT ke-80, SKH Kedaualatan Rakyat (KR) ingin memberikan kontribusi istimewa bagi pembaca dan masyarakat dalam bentuk program keagamaan. Yaitu KR Yogya menggandeng Biro Umrah Latifa Haramain, dengan mengusung konsep 'Umrah Sehat dan Syariah' akan menyelenggarakan program 'Umrah Bersama KR Yogya'.

"Program ini tak sekadar perjalanan ibadah, tapi juga memberikan pembekalan intensif melalui 'Sekolah Umrah' yang diselenggarakan setiap hari Sabtu di Griya KR. Dengan layanan dan fasilitas yang profesional, harga kompetitif dan nuansa kekeluargaan. Program ini ditujukan untuk memberikan pengalaman ibadah yang khusus, aman dan berkesan," ujar Drs H Taufik Ridwan, Direktur PT Latifa Dini Wisata Sejahtera (Latifa Haramain) saat penandatanganan MoU 'Sekolah Umrah Bareng KR, Mabrud dan Migunani' antara Biro Umrah Latifa Haramain dengan PT BP KR.

Peresmian 'Sekolah Umrah Bareng KR' ditandai penandatanganan MoU di Griya KR, Jalan Margo Utomo 40-42 Yogya, Kamis (8/5) dilakukan Taufik Ridwan dan Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis PT BP KR Yoeke Indra Agung Laksana SE

(Ketua HUT ke-80 KR tahun 2025), disaksikan jajaran Direksi PT BP KR.

Menurut Taufik Ridwan, tujuan diadakannya 'Sekolah Umrah Bareng KR' tersebut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah dengan bimbingan dan pendampingan yang terpercaya. Pembimbing utama Latifa Haramain ada dua orang yakni Dr dr Sagiran SpB (K) KL dan dr Tri Ermin Fadlna M Kes. Selain itu, untuk menyemarakkan HUT ke-80 KR melalui kegiatan keagamaan yang berdampak positif.

Sementara itu, Yoeke Indra menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan 'Sekolah Umrah Bareng KR' sudah bisa mendaftarkan diri melalui penanggungjawab kegiatan Direktur Keuangan KR Yuriya Nugroho Samawi. "Bu Yuriya nantinya yang bertanggung jawab dan mengkoordinir pendaftaran peserta Sekolah Umrah Bareng KR," ujar Yoeke.

Dijelaskan Yoeke, dengan adanya Sekolah Umrah Bareng KR dalam rangka memperingati HUT ke-80 KR ini, diharapkan akan memberi dampak yang baik bagi umat Islam khususnya di DIY yang akan melaksanakan umrah. (Rar)-f

Lembaga Kemahasiswaan FH UJB Mengulas Urgensi Pembahasan Rancangan KUHP



Narasumber saat menyampaikan paparan dalam semnas.

YOGYA (KR) - Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Janabadra (FH UJB), Unit Pengabdian dan Studi Hukum (UPSH) menggelar seminar nasional bertema 'Urgensi Pembahasan Rancangan KUHP dalam Rangka Dekolonialisasi Sistem Hukum Indonesia' di Kampus Kebangsaan Universitas Janabadra Yogyakarta, Selasa (6/5). Seminar diikuti sekitar 300 peserta dari mahasiswa dan dosen FH UJB dan mahasiswa FH perguruan tinggi lain di Yogyakarta.

Seminar menghadirkan pembicara dari akademisi yaitu Prof Dr Hari Purwadi SH MHum (Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), Dr Suryawan Rharjo SH LLM dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra, dan praktisi Dr Suroto SH MH (Kepala

Kejaksaan Negeri Yogyakarta) serta Dr Wilson Bugner F Pasaribu SIK MH (Kapolda Kulonprogo).

Dr Sudiyan SH MHum, Dekan FH UJB dalam sambutannya menyatakan bahwa sebagai tradisi ilmiah di FH UJB, seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait substansi dan urgensi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dan saat ini sedang ada proses amandemen terhadap UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Menurutnya, amandemen atau perubahan terhadap suatu UU atau hukum memang sangat diperlukan ketika hukum atau UU itu sudah tidak lagi dapat mengikuti perkembangan zaman. Ada pepatah bahwa 'Hukum selalu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat'.

Perubahan sosial menuntut pada pembentuk UU, dalam menentukan arah kebijakan hukum, termasuk UU No 8 tahun 1981.

"Dilihat dari umurnya, KUHP ini baru 44 tahun, peraturan yang lebih banyak bersinggungan dengan masalah HAM, baik hak tersangka/terdakwa maupun hak korban dirasakan sudah layak untuk dilakukan amandemen," tegas Sudiyan.

Dr Risdiyanto ST MT, Rektor Universitas Janabadra menyambut baik atas kegiatan mahasiswa hukum ini. Menurutnya, suatu negara akan maju perekonomiannya dan kesejahteraannya apabila penegakan hukum benar-benar dilaksanakan dan keadilan yang menjadi tujuan utama. "Hukum adalah panglima, maka bagaimana caranya agar keadilan masyarakat dapat diwujudkan. Paling tidak dari aspek aparat penegak hukum benar-benar memiliki integritas dan menjunjung tinggi asas keadilan," ujarnya.

Prof Hari Purwadi menyampaikan bahwa secara teoritis KUHP di Indonesia dipengaruhi oleh tiga tradisi yaitu tradisi civil law (civil law tradition), tradisi agama (islamic legal tradition) dan tradisi common law (common law tradition). (Dev)-f

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS FILSAFAT

Sivitas Fakultas Filsafat UGM
mengucapkan

Selamat dan Sukses

atas pelantikan

Prof. Dr. Rivan Achmad Purwantono, M.H.

Alumni Fakultas Filsafat UGM Tahun 1985

sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk

filasafat@ugm.ac.id

filasafat_ugm

filasafat.ugm.ac.id

MANAJEMEN RISIKO EFEKTIF & PRUDENT, Kualitas Kredit BRI Semakin Membaik dengan Pencadangan Kuat



KR - Istimewa

BRI berhasil mencatatkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL)

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan kinerja positif dalam menjaga kualitas aset di tengah dinamika ekonomi global. Hingga akhir Triwulan I/2025, BRI berhasil mencatatkan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang membaik, serta memperkuat pencadangan risiko kredit sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan keuangan secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan pada Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan I 2025 oleh Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom di Jakarta (30/04). "Rasio NPL BRI tercatat membaik dari 3,11% pada akhir Maret 2024 menjadi 2,97% pada akhir Maret 2025. Penurunan rasio NPL ini merupakan hasil dari penerapan manajemen risiko yang efektif dan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam proses penyaluran kredit di seluruh segmen bisnis BRI," ujar Mucharom.

Selain itu, perbaikan kualitas kredit juga tercermin dari rasio Loan at Risk (LAR) BRI yang turun signifikan, dari 12,68% pada Triwulan I 2024 menjadi 11,12% pada Triwulan I 2025. Perbaikan ini menandakan pengelolaan portofolio kredit BRI semakin sehat dan terkendali, meskipun sektor usaha masih menghadapi tantangan eksternal seperti ketidakpastian geopolitik.

Untuk menjaga ketahanan

neraca, BRI juga terus meningkatkan pencadangan risiko yang memadai. Hingga akhir Maret 2025, Rasio NPL Coverage BRI terbilang sangat kuat dengan rasio sebesar 200,60%. Pencapaian ini menunjukkan kesiapan BRI dalam mengantisipasi potensi pemburukan kualitas aset yang mungkin timbul akibat ketidakpastian perekonomian domestik maupun global.

"Dengan coverage ratio yang sangat memadai ini, BRI tidak hanya mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan, namun juga memberikan keyakinan kepada

investor, regulator, dan seluruh stakeholders bahwa perseroan memiliki fundamental yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi, terutama di tengah kondisi tekanan ekonomi dan geopolitik global seperti perang tarif," ujar Mucharom.

Sementara itu, dari sisi penyaluran kredit, hingga akhir Triwulan I BRI berhasil mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.373,66 triliun atau tumbuh 4,97% yoy. Penyaluran kredit BRI masih didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dari total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp1.126,02 triliun. Capaian positif ini memperkuat komitmen BRI dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Melalui dukungan pembiayaan kepada sektor produktif, BRI berperan strategis dalam membuka lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai informasi, Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 24 Maret 2025 dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK. (*)



KR - Istimewa

Manajemen Risiko Efektif & Prudent, Kualitas Kredit BRI Semakin Membaik dengan Pencadangan Kuat